

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi di era globalisasi yang pada saat ini tengah melanda seluruh dunia memberikan dampak positif terhadap pergaulan antar bangsa. Batas-batas yang menjadi penghalang antara satu negara dengan negara lain, mulai terlihat pudar. Secara perlahan-lahan masyarakat nasional mulai berubah menjadi masyarakat internasional. Globalisasi telah berhasil membuat dunia menjadi lebih terbuka untuk menerima nilai baru yang dianggap lebih baik. Secara tidak langsung, membuka kemungkinan bahwa aktor-aktor yang terlibat tidak hanya negara yang diwakili oleh pemerintah pusat, melainkan juga aktor sub-state di dalam negara seperti pemerintah daerah yang bisa di representasikan oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi ataupun kota dan kabupaten.

Sebuah negara tidak dapat berdiri sendiri, oleh karena itu suatu negara membutuhkan hadirnya negara lain agar dapat mencapai kepentingan nasionalnya (national interest), cara yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain dalam bentuk kerjasama internasional. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kerjasama yang terjadi tidak hanya melibatkan negara saja.

Salah satu aktor atau aktor hubungan etnis (Pemda) kecil, bersamaan dengan munculnya konsep paradiplomasi dan desentralisasi, adalah pemerintah daerah (pemerintah kota atau pemerintah kabupaten) negara di seluruh, bekerja sama erat di daerah dan kota. Devolusi memiliki tiga tujuan, yaitu tujuan politik. Pencariannya adalah untuk menciptakan kekuatan demokrasi sendiri, demokrasi, demokrasi adalah sistem yang didasarkan pada kepemilikan populer dalam bentuk pemilihan lokal dan langsung. Sedangkan tujuan ketiga

adalah ekonomi dan sosial, untuk memahami penggunaan modal sosial, intelektual dan finansial dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. (Suwir, 2013).

Hubungan internasional yang ada dalam klaster politik global saat ini tidak menutup ruang lingkup dan batasan bagi terselenggaranya hubungan kerjasama antar aktor yang ada, sehingga para aktor pada tingkat pemerintahan yang berbeda dapat saling bekerjasama sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh undang-undang masing-masing negara atau otoritas pengawasan. Perkembangan ini mempengaruhi proses, prosedur, dan isi pesan. Akibatnya, diplomasi tidak hanya mengacu pada kegiatan aktor diplomatik dari Eropa Barat, tetapi juga pada aktor yang telah diidentifikasi sebagai Dunia Ketiga. (Djelantik, 2008, p. 60).

Kerjasama internasional yang sering dilakukan di era globalisasi ini tidak membutuhkan kerjasama yang dilakukan oleh bangsa dan negara, tetapi juga dapat dilakukan dengan kekuatan besar. Dari perspektif Robert Keohane dan Joseph Nye dalam bukunya *Power and Independence* tahun 1977, dapat dipastikan bahwa ada saling ketergantungan antar aktor ketika kerjasama terjadi, dan bahwa "saling berkembang dan saling ketergantungan" adalah tujuan dan sangat efektif dalam mewujudkan manfaat (Keohane) .& I, 1977).). Salah satu pertukaran tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama internasional bilateral antara dua negara dan dua kota yang disebut kerjasama Sister City.

Solusi lain untuk meningkatkan kemungkinan antarkota adalah dengan bekerja sama di wilayah yang ada. Dan konsep modern kerjasama yang relevan disini adalah berupa kerjasama sister city dengan kota-kota di luar negeri. Oleh karena itu, kerjasama daerah yang telah terjalin harus memberikan keuntungan penting bagi pembangunan daerah.

Penerapan sister city sendiri di Indonesia berdasarkan pemberitahuan dari Menteri Dalam Negeri No. 193 Tahun 1993 tentang kegiatan seperti kerjasama antar kota (*Sister City*) dan kesepakatan antar provinsi (*Sister Province*), sebenarnya untuk menjalin kerjasama di bidang ekonomi, namun dengan semakin banyaknya kota di Indonesia. beberapa negara dan sektor sektor lain menjadi penting, seperti sektor pertukaran budaya dan peningkatan pendidikan di kedua negara yang bekerja sama. Kemudian setelah surat edaran tersebut dibuat, dasar hukum Indonesia untuk kerjasama luar negeri tanpa aktor pemerintah pusat semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang

“Hubungan Luar Negeri” dengan penjelasan dan definisi tentang bagaimana, dan apa kelas hubungan luar negeri. diwujudkan. terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan menteri. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, daerah diperbolehkan melakukan kerjasama dalam pelayanan publik yang efisien dan efektif serta saling menguntungkan (Pasal 363, UU No. 23/2014). Kerja sama tersebut dapat melibatkan Daerah dengan Daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Kerja sama tersebut antara lain meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, pemajuan potensi daerah, dan kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan menyelesaikan tantangan-tantangan yang dihadapinya. Pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki agar bisa mandiri dalam membangun daerahnya masing-masing. Berlandaskan hal ini, pemerintah daerah tidak hanya menjalin hubungan kerjasama dengan daerah lain di negara yang sama, tetapi juga melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah yang berasal dari negara lain (Bappenas Direktorat Otonomi Daerah, 2009).

Menurut Widjaja, otonomi daerah diartikan sebagai suatu bentuk dari sistem desentralisasi pemerintahan yang didasarkan pada suatu tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan bangsa secara lebih menyeluruh dan dianggap sebagai sebuah upaya untuk dapat lebih mendekatkan diri dengan berbagai macam tujuan penyelenggaraan pemerintahan (Widjaja, 1992)

Di Indonesia sendiri, sudah banyak daerah yang menjalin kerjasama *Sister City* di Indonesia mulai muncul pada tahun 1960-an. Munculnya kerjasama tersebut, diawali dengan persamaan yang dimiliki kedua kota, seperti sesama ibukota negara, contohnya Jakarta yang menjalin kerjasama dengan berbagai ibukota negara lainnya. Pada tahun 1980-an kerjasama *Sister City* semakin marak (Widjaja, 1992).

Kemitraan antara Bandung dan Suwon dimulai dengan permintaan pemerintah Suwon untuk penggabungan Bandung dan sister city, yang dikomunikasikan melalui KBRI pada 5 Agustus 1996. Kedua kota menandatangani Letter of Intent. Pada tanggal 25 Agustus 1997, Walikota Bandung Wayu Hamijaya dan Walikota Suwon Shim Jae Duk menandatangani nota kesepahaman. Tujuan ini dicapai dengan memprioritaskan potensi yang ada di Bandung untuk mendorong perbaikan dan pertumbuhan di berbagai sektor, terutama ekonomi dan perdagangan, pendidikan, budaya dan pariwisata, kesehatan, sumber daya manusia dan lingkungan.

Kerjasama *Sister City* haruslah memiliki manfaat tinggi untuk pembangunan daerah, diantaranya adalah:

- a. Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Industri, dan Pariwisata.
- b. Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Administrasi.
- c. Pendidikan, Kebudayaan, Kesejahteraan, Sosial, Pemuda, dan Olahraga.
- d. Bidang-bidang lain yang kemudian disetujui oleh kedua belah pihak (Kementerian Dalam Negeri, 2014).

Kerjasama sister city saat ini lebih terkonsentrasi di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan pariwisata. Hal ini terlihat dari program pertukaran pelajar (Youth Exchange) yang dicanangkan pada awal tahun 2011, saat Suwon Youth Foundation mengirimkan mahasiswa dan delegasi mahasiswa ke Kota Bandung. Pertukaran pelajar memberikan pengalaman yang membantu memperluas wawasan. Diharapkan melalui acara ini akan lahir pemimpin-pemimpin yang menghargai perbedaan dan menjaga perdamaian dan persahabatan.

Manfaat dari kerjasama ini diharapkan akan membantu meningkatkan wisatawan dari mancanegara khususnya untuk lebih mengenal Bandung dan sekitarnya. Akan tetapi pada data yang berhasil dihimpun penulis, terdapat penurunan angka wisatawan mancanegara yang datang pada tahun 2016 yang sebelumnya berjumlah 182.384 orang menjadi 168.513 orang pada tahun 2017 kemudian berjumlah 156.643 orang pada tahun 2018 (BPS Jawa Barat, 2019).

Kerjasama kedua kota tersebut dimulai pada tahun 2011. Sejak 2011 hingga 2018, kedua belah pihak melakukan berbagai kerja sama dalam kerangka kerja sama pariwisata, teknologi informasi, pendidikan, budaya, dan kesejahteraan sosial. Kesimpulannya, penulis tertarik untuk menulis makalah tentang analisis kerjasama sister city Bandung-Suwon tahun 2016-2018 khususnya dalam bidang pariwisata, pendidikan dan kebudayaan.

Penelitian ini menggunakan parameter dari periode 2016-2018, karena selama ini belum ada penelitian tentang kerangka kerja sama sister city Bandung-Suwon. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada kerjasama sister-city pada topik pariwisata, dengan sedikit perhatian yang diberikan pada kerjasama, terutama dalam hal konsep sister-city.

1.2 Rumusan Masalah

Saat ini, kurang lebih 100 kerja sama *Sister City* internasional berbentuk sister hood telah tercatat di departemen luar negeri Republik Indonesia. Dari catatan yang ada tidak sampai 15% dari kerjasama yang berjalan dengan baik, dan sekitar 20% berjalan seadanya, serta lebih dari 65% hampir tidak melakukan apa-apa. Hambatan dan retriksi yang menggambarkan kerjasama ini memiliki tingkatan keberhasilan rendah ini menarik untuk diteliti. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi dan memahami hambatan dalam pelaksanaan kerjasama *Sister City* antara kota Suwon dan Bandung.

Banyak faktor yang menyebabkan kerja sama *Sister City* terhambat, dan penulis ingin melihat hal tersebut sebagai rumusan masalah yang jelas dalam karya ilmiah ini yaitu: “Bagaimana Kerja Sama *Sister City* Kota Bandung dan Kota Suwon di Bidang Pariwisata dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan pada periode 2016-2018?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai pada akhir penulisan, yaitu : Mengetahui peningkatan wisatawan yang terjadi pada kota Bandung setelah adanya kerjasama yang dilakukan dengan kota Suwon. Dan memahami

hambatan dan tantangan dalam implementasi kerjasama *Sister City* ini. Peluang dan tantangan yang diidentifikasi dalam penelitian ini digunakan untuk dasar pertimbangan dalam peningkatan wisatawan, umumnya dalam industry pariwisata nasional dan khususnya untuk kota Bandung dalam konteks kerjasama *Sister City* dengan kota Suwon.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan penambahan wawasan dalam kajian ilmu hubungan internasional dalam segi pemikiran dalam hal Kerjasama *Sister City* di Bandung dengan kota Suwon.
2. Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah saran dan membentuk sebuah pemikiran serta memberikan hasil kerja pemerintah Indonesia yang diwakilkan oleh pemerintahan daerah dalam menjalin kerjasama dengan bentuk *Sister City*.

1.5 Struktur Penelitian

Untuk memahami alur pemikiran tulisan ini, maka tulisan ini dibagi dalam bagian-bagian yang terdiri dari bab dan sub bab. Dalam penulisan penelitian ini, struktur yang jelas dan sistematis digunakan untuk memudahkan penyampaian dan pemeahaman materi penelitian untuk pembaca. Sistematika penulisan adalah membagi hasil penelitian ini ke dalam lima bab. Yang terdiri dari pendahuluan, tujuan pustaka, metode penelitian, pembahasan, dan penutup.

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini akan menjabarkan permasalahan yang akan dibahas yang terdiri dari latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika penulisan yang akan digunakan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai kerangka teori Diplomasi hingga Paradiplomasi, konsep kerjasama internasional, dan referensi atau penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik permasalahan yaitu kajian mengenai kerjasama *Sister City* antar kedua Pemerintah Kota di Indonesia dan luar Indonesia.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai metodologi penelitian, teknis analisa, pendekatan penelitian serta teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk menyelesaikan tulisan ini,

4. BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab 4 akan dijelaskan bagaimana diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Suwon dalam menjalin kerjasama dengan Kota Bandung dan bagaimana implementasi yang sudah ada dalam kerjasama antara keduanya. Juga akan dilihat bagaimana prospek kerjasama serta hambatan dan tantangan yang muncul dalam kerjasama kedua Kota tersebut.

5. BAB V PENUTUP

Bab penutup ini mengandung kesimpulan dari pokok permasalahan penelitian. Dalam bab ini akan disimpulkan hasil analisis data yang diperoleh pada bab II dan bab III. Beserta kesimpulan akan hasil penelitian akan disampaikan dalam bab ini. Saran untuk direksi penelitian selanjutnya juga akan dituliskan dalam bab ini.